



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WARSONO**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT PERENCANAAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN**
3. NHK : **192678**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.203.307.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/131 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 830.825.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.349.774.000
3. Tanah Seluas 1622 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 22.708.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **1.004.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI DUMP TRUCK FE SUPER HDX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **1.090.075.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **807.251.421**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.176.839.353**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **7.281.472.774**



III. HUTANG

Rp. 208.552.676

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.072.920.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.